

**Pengaruh Pdrb Industri Pengolahan,  
Ump Dan Unit Usaha Industri  
Pengolahan Terhadap Penyerapan  
Tenaga Kerja Industri Pengolahan Di  
Pulau Jawa Tahun 2010-2019**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Fabiyanti Ratna Safitri  
145020101111020**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2021**

# **Pengaruh Pdrb Industri Pengolahan, Ump Dan Unit Usaha Industri Pengolahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019**

**Fabiyanti Ratna Safitri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: Safitrifabi@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Tingkat pengangguran terbuka dipulau jawa masih relatif tinggi meskipun pulau jawa sebagai pusat perekonomian nasional dengan dominasi PDRB Industri Pengolahan dan jumlah unit usahanya, namun jumlah tenaga kerja di industri pengolahan masih pada di posisi ke empat. Sehingga kinerja Industri Pengolahan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan perlu dipertanyakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Unit Usaha Industri Pengolahan dan PDRB Industri Pengolahan terhadap penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa tahun 2010-2019. Sebagai penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis Regresi Ordinary Last Square dari data time series yang diolah menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan: 1) UMP berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan Tenaga Kerja; 2) PDRB Industri Pengolahan berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan Tenaga Kerja; 3) Unit Usaha Industri Pengolahan berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan Tenaga Kerja; 4) UMP, Unit Usaha Industri Pengolahan dan PDRB Industri Pengolahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan Tenaga Kerja.*

*Kata kunci: Tenaga Kerja, UMP, PDRB, Unit Usaha Industri Pengolahan*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pulau Jawa merupakan penggerak roda pertumbuhan ekonomi nasional, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diketahui empat dari enam Provinsi di Pulau Jawa termasuk kedalam Provinsi dengan nilai PDRB tertinggi yang memberikan sumbangan besar bagi nilai PDB nasional. Sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Atas Harga Konstan menurut Lapangan Usaha pada Enam Provinsi di Pulau Jawa pada Tahun 2014-2016. Maka PDRB ondustri pengolahan sekaligus berperan sebagai Leading Sector terhadap proses pembangunan ekonomi Provinsi- Provinsi di Pulau Jawa.

Pulau Jawa dengan tingkat penduduk terpadat di indonesia, berdasarkan data mengenai Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Pulau Jawa pada Tahun 2014-2017 masih memiliki pemasalahan terkait tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan penduduk miskin yang relative tinggi, terutama pada periode 2010-2019. Hal ini menjadi tantangan bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional yakni berkurangnya pengangguran dan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh sekuluh rakyat indonesia. PDRB Industri Pengolahan memiliki nilai PDRB yang paling mendominasi, terutama dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi- Provinsi di Pulau Jawa, namun jumlah Tenaga Kerja pada sektor Industri Pengolahan secara kumulatif di semua Provinsi di Pulau Jawa selama 2014-2017 masih menduduki urutan keempat.

Pemaparan diatas mengarahkan pentingnya analisis mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kineja Sektor Industri Pengolahan dalam meningkatkan lapangan perkerjaan sebagai tujuan pembangunan. oleh Ropingi (2004) menyatakan lebih dibutuhkannya kontribusi sektor ekonomi yang memberikan peningkatan lapangan pekerjaan tidak hanya berdasarkan kontribusi nilai produksi sektor ekonomi saja. Ananlisis lebih jauh oleh Maulia (2014) menyatakan besarnya upah minimum serta unit usaha sektor industri berpengaruh signifikan terhadap banyaknya Tenaga Kerja industri di Provinsi Jawa Timur, sedangkan nilai PDRB riil di sektor industri tidak berpengaruh signifikan bagi penyerapan Tenaga Kerja. Serta menurut Karib (2012) bahwa jumlah Unit Usaha adalah faktor yang sangat menentukan penyerapan Tenaga Kerja di sektor industri di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis melakukan penelitian mengenai penyerapan tenaga kera industri pengolahan di pulau jawa pada periode tahun 2010-2019 dengan beberapa variabel terkait yaitu nilai PDRB industri pengolahan, upah minimum provinsi dan unit usaha industri pengolahan.

Rumusan Masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Provinsi Bruto (PDRB) Industri Pengolahan terhadap tingkat penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa periode 2010-2019 ?
2. Bagaimanakah pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa periode 2010-2019 ?
3. Bagaimanakah pengaruh Jumlah Unit Usaha Industri Pengolahan terhadap tingkat penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa periode 2010-2019 ? .

## B.KAJIAN PUSTAKA

### 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Industri Pengolahan

BPS menyatakan PDRB adalah nilai tambah akhir barang serta jasa yang diproduksi seluruh unit produksi pada suatu daerah selama periode tertentu, penghitungan BPS diklasifikasikan dalam sembilan sektor.

pendekatan produksi:  $Y=(P1X Q1)+(P2X Q2)+\dots+(PnX Qn)$ .....(2.1)

pendekatan pendapatan:  $Y = r + w + i + p$ .....(2.2)

pendekatan pengeluaran:  $Y = C + I + G + ( X - M )$ .....(2.3)

PDRB atas harga berlaku guna melihat struktur serta pergeseran struktur ekonomi, PDRB atas harga konstan dapat mengetahui laju pertumbuhan ekonomi riil. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1984 perindustrian, industri merupakan kegiatan ekonomi untuk mengolah bahan menjadi suatu barang yang nilai ekonominya lebih tinggi. Sehingga PDRB Industri Pengolahan atas dasar harga konstan merupakan keseluruhan nilai tambah barang serta jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit produksi dengan kegiatan pengolahan menambah nilai guna barang, termasuk industri maupun pekerjaan perakitan di suatu daerah selama satu periode tertentu dihitung dengan dasar harga tahun tertentu.

### 2.2 Tenaga Kerja Industri Pengolahan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ketenagakerjaan, menyatakan Tenaga Kerja sebagai “Setiap orang yang melakukan pekerjaan menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Lebih jauh menurut Payaman yang dikutip Lalu Husni (2015), menyatakan sebagai penduduk yang bekerja, sedang mencari kerja serta melakukan pekerjaan lain yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, dan hanya dilihat atas umur maksimum yaitu 55 tahun atau masih dalam usia kerja. Sukirno (2005) menyatakan bahwa Penyerapan Tenaga Kerja sebagai bentuk permintaan atas Tenaga Kerja yaitu keseluruhan hubungan berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang dipekerjakan. Tenaga Kerja yang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan perusahaan di sektor tersebut. Sehingga menurut Payaman (2001:89), penambahan permintaan akan Tenaga Kerja menjadi tergantung pada penambahan akan permintaan masyarakat pada barang produksi, pengusaha juga dianggap sebagai price taker karena pengusaha tidak bisa memengaruhi harga guna memaksimalkan tingkat laba yang diterima hanya dilakukan melalui pengaturan jumlah pekerja. Payaman (1985:74-75), juga menjelaskan bahwa tingkat tambahan hasil produksi dengan adanya penambahan satu orang Tenaga Kerja disebut marginal physical product of labor (MPPL), sesuai tingkat skill dan kemampuan menggunakan teknologi produksi. Serta penerimaan uang dengan tambahan atas hasil produksi marginal, disebut sebagai marginal revenue, dengan nilai rupiah atas akumulasi MPPL.

### 2.3 Upah Minim Provinsi

Sistem pengupahan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3, hubungan Industri harus berdasarkan pancasila yaitu: menjamin kehidupan layak, mencerminkan kinerja seseorang, insentif mendorong peningkatan produktivitas. Undang-Undang no 13. Pada Tahun 2003 ketenagakerjaan, upah sebagai hak pekerja dalam niali uang, ditetapkan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja maupun perundang undangan. Penetapan tingkat UMP, diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang melibatkan pemerintah daerah sebagai birokrat, pihak akademisi, buruh dan pengusaha. melalui survei lapangan dengan mempertimbangkan harga sejumlah kebutuhan guna menentukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

pasal 94 Undang-Undang no.13 tahun 2003 Ketenagakerjaan, komponen upah yaitu upah pokok serta tunjangan tetap, sehingga nominal upah pokok yaitu minimal 75 % atas upah pokok serta tunjangan tetap. Berdasarkan KHL serta memperhatikan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, Lebih jauh dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-01/MEN/1999 dasar menetapkan upah minimum, yaitu: KHM, IHK, kelangsungan perusahaan, upah umum di daerah serta antar daerah tertentu, Kondisi pasar tenaga kerja, Tingkat perekonomian serta pendapatan perkapita

### 2.4 Unit Usaha

BPS menyatakan unit kegiatan ekonomi / produksi secara perseorangan, rumah tangga dan suatu badan, kewenangan berdasarkan lokasi bangunan fisik, wilayah operasi. bertujuan mengolah barang melalui proses kimia, mekanis, maupun manual sifat pengolahan ini dekat pada pemakai atau konsumen akhir. Klasifikasi unit kegiatan ekonomi tersebut sesuai dengan Survei Industri Pengolahan berdasarkan klasifikasi dari International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) pada revisi 4 , menjadi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tahun 2009 dengan 24 golongan.

## C.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, (Widoyoko,2012).penelitian kuantitatif menggambarkan kejadian sistematis atau fakta akurat mengenai berbagai sifat populasi dan objek penelitian. Data penelitian merupakan data sekunder dari lembaga stastistik selama perode 2010-2019, jenis data penelitian adalah time series yang memaparkan analisis data pada rentang waktu tertentu (Gujarati dan Porter, 2012:235). Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel dependen dan dilambangkan dengan Y, publikasi mengenai jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan bekerja menurut lapangan pekerjaan utama enam Provinsi di Pulau Jawa per bulan agustus (ribu orang) selama periode tahun 2010-2019 dalam satuan jiwa. Variabel independen dengan lambang X adalah variabel yang berpengaruh terhadap perubahan nilai variable dependen, PDRB sebagai X1 dalam publikasi BPS mengenai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha khususnya pada Industri Pengolahan pada Provinsi- Provinsi di Pulau Jawa selama periode 2010-2019 satuan Miliar rupiah. Upah Minimum Provinsi sebagai (X2) rata-rata nilai upah yang diterima pekerja sektor Industri Pengolahan tahun 2010-2019 di enam Provinsi di Pulau Jawa diukur satuan ribu rupiah. Unit Usaha Industri Pengolahan(X3) publikasi Jumlah Unit Usaha/perusahaan di Provinsi akumulasi dari 15 sub kategori lapangan usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), satuan unit.

#### 1. Asumsi Dasar Klasik

Bertujuan mengetahui baik atau tidaknya model regresi yang digunakan untuk melakukan penaksiran. Menurut Gujarati (2003) model penelitian dinilai baik jika telah bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Asumsi dasar klasik terdiri dari uji: Uji Normalitas : faktor kesalahan terdistribusi secara normal ataupun tidak, dideteksi melalui grafik Normal P-P Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Multikolinearitas : adanya hubungan linier (korelasi) sempurna antara beberapa maupun semua variable indepeden, dilakukan melalui tingkat variance inflation faktor (VIF) masing-masing variabel bebas, jika korelasi antar variabel bebas memiliki nilai sama dengan 0 maka nilai VIF sama dengan 1 sehingga tidak terjadi kolinearitas. Uji Autokorelasi ; apakah observasi secara beruntun berkaitan antar satu dan yang lain. Gujarati (2003), mendeteksi dengan plotting atau grafik, melihat nilai Durbin Watson (DW). melihat nilai Obs\*R-squared dibandingkan nilai chi-square pada tingkat kepercayaan tertentu ( $\alpha$ ). Uji heteroskedasitas adanya ketidaksamaan antara varians residual antar pengamatan. dilakukan melalui grafik Scatterplot dilakukan dengan melihat antara nilai prediksi variabel independen Regression Standardized Predicted Value (ZPRED) dengan nilai residualnya Regression Studentized Residual (SRESID). Hasil uji untuk asumsi heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi apabila pada grafik Scatter plot ZPRED dan SRESID terdapat titik-titik plot yang tersebar secara acak.

#### 2. Regresi Linear Berganda (Ordinary Least Square)

Menggunakan software SPSS pada tingkat kesalahan 5%, sebagai studi ketergantungan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Metode estimasi untuk mendapatkan error nilai terkecil dan nilai parameter dengan sifat Best Linear Unbiased Estimator. analisis permodelan dengan persamaan berikut:

$$TK = \beta_0 - \beta_1 \text{PDRB} - \beta_2 \text{UMP} + \beta_3 \text{UU} + e \dots \dots \dots (3.2)$$

Uji F guna mengetahui semua variabel independen telah signifikan mempengaruhi variabel dependen , signifikansi F lebih kecil dari tingkat kepercayaan 5% maka variabel independen bersama berpengaruh pada variable dependen. Uji parsial (uji t) guna mengetahui variabel bebas secara parsial telah signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Melalui pengujian hipotesa, berikut: a. Membandingkan nilai t-statistik dan t tabel, pada ( $\alpha$ ) = 5%, nilai H0 ditolak jika nilai t statistik lebih dari nilai t tabel. variabel bebas signifikan pada variabel tak bebas. b. Membandingkan P-Value dengan  $\alpha$  bernilai 5%, yaitu H0 ditolak apabila probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . variabel bebas signifikan berpengaruh pada variabel tak bebas. Uji koefisien determinasi mengukur kemampuan model menerangkan variabel dependen, sebagai goodness of fit ; besaran mengukur kecocokan-sesuai antara persamaan terhadap nilai Y sebenarnya. melalui kriteria berikut: H0 diterima apabila nilai R2 antara 0-1, jika nilai R2 = 1 garis regresi dapat menjelaskan secara sempurna variabel Y.

## D.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan Menggunakan Grafik Normal P-P Plot, hasil pengujian normalitas residual dengan grafik Normal P-P Plot diketahui titik plot telah berhimpit pada garis diagonal maka residual telah mengikuti distribusi normal serta terpenuhinya asumsi normalitas. Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual dengan uji Kolmogorov-Smirnov, telah diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,148 yang lebih besar dari 0,05 ( $p > 0,05$ ) hal tersebut berarti bahwa residual telah mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

##### 4.1.2 Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinieritas dengan uji VIF menunjukkan hasil bahwa nilai VIF PDRB Industri Pengolahan (X1) yaitu 1,533, UMP (X2) yaitu 1,044, dan Unit Usaha Industri Pengolahan (X3) yaitu 1,525 dan dapat dinyatakan nilai VIF tiap variabel bebas telah kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ) yang berarti bahwa tidak adanya multikolinieritas pada model

maka asumsi multikolinieritas telah terpenuhi.

4.1.3 Uji Autokorelasi

Hasil pengujian Durbin-Watson, didapatkan nilai DW yang mendekati antara nilai dU dan 4-dU ( $dU < DW < 4-dU$ ), hal tersebut berarti bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi maka asumsi autokorelasi telah terpenuhi.

4.1.4 Uji Heterokodestisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan Scatter plot ZPRED serta SRESID didapatkan bahwa titik plot tersebar acak sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

**4.3. Persamaan Regresi yang terbentuk :**

Tabel 4.4 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.888	1.252		14.285	.000
PDRB	-.078	.016	-.181	-4.988	.000
UMP	-.797	.083	-.289	-9.661	.000
Unit Usaha	1.106	.045	.894	24.713	.000

Sumber: SPSS Diolah (2021)

Hasil persamaan regresi antara variabel bebas yaitu PDRB Industri Pengolahan (X1), UMP (X2), dan Unit Usaha Industri Pengolahan (X3) terhadap variabel terikat Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y), berikut:

$$y = a - b_1 x_1 - b_2 x_2 + b_3 x_3 + e \dots\dots\dots(4.1)$$

$$Y = 17,888 - 0,078 X_1 - 0,797 X_2 + 1,106 X_3 + e \dots\dots\dots(4.2)$$

Penjabaran sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (a) yaitu 17,888 menunjukkan tanpa pengaruh variabel bebas PDRB Industri Pengolahan (X1), UMP (X2), dan Unit Usaha Industri Pengolahan (X3) maka nilai variabel Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y) adalah sebesar 17,888.

b. Nilai koefisien PDRB Industri Pengolahan (X1) sebesar -0,078 yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara variabel PDRB Industri Pengolahan (X1) terhadap variabel Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y). Dalam setiap peningkatan nilai PDRB Industri Pengolahan (X1) akan berpengaruh terhadap penurunan nilai prediksi Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y), berarti semakin tinggi nilai PDRB Industri Pengolahan (X1) akan berpengaruh terhadap semakin rendahnya Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y).

c. Nilai koefisien UMP (X2) yaitu -0,797 menunjukkan pengaruh negatif antara variabel UMP (X2) terhadap variabel Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y), berarti tiap stiap peningkatan UMP (X2) berpengaruh pafa penurunan tingkat prediksi Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y), berarti tingginya nilai UMP (X2) berpengaruh pada rendahnya Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y).

d. Nilai koefisien Unit Usaha Industri Pengolahan (X3) sebesar 1,106 menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel Unit Industri Pengolahan (X3) pada variabel Tenaga Kerja di Industri Pengolahan (Y), berarti dengan peningkatan Unit Industri Pengolahan (X3) berpengaruh pada meningkatnya nilai prediksi Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y), berarti semakin meningkatnya Unit Usaha Industri Pengolahan (X3) akan mempengaruhi tingginya Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y).

**4.3 Uji Hipotesis**

4.3.1 Uji Sigifikasi Simultan (Uji F)

Pengujian simultan dengan pengujian F menunjukkan hasil bahwa nilai F hitung (309,980) lebih besar dari nilai F tabel (2,643) dan nilai signifikansi sebesar (0,000) kurang dari nilai alpha (0,050). Hal tersebut menyatakan bahwa H1 telah diterima yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan diantara PDRB Industri Pengolahan (X1), UMP (X2), dan Unit Usaha Industri Pengolahan (X3) terhadap Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y) secara simultan atau bersama-sama.

4.3.2 Hasil Koefisien Determinasi (R-square)

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa R Square yaitu 0,798 yang berarti variabel PDRB Industri Pengolahan (X1), UMP (X2), dan Unit Usaha Industri Pengolahan (X3) dapat menjelaskan variabel Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y) sebesar 79,8 persen, dan sisanya 68,3 persen dapat dijelaskan variabel lain diluar model penelitian.

4.3.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

A. Uji parsial variabel PDRB Industri Pengolahan (x1) pada variabel Tenaga Kerja Industri Pengolahan (y) diperoleh t hitung (-4,988) lebih besar dari t tabel (1,970) mengandung berarti setiap peningkatan nilai PDRB Industri Pengolahan sebesar 1 Rp Milliar maka Tenaga Kerja Industri Pengolahan akan berkurang sebanyak 4,988 orang., selain itu signifikansi (0.000) bernilai kurang dari nilai alpha (0,050) maka dinyatakan H1 diterima yang berarti bahwa ada pengaruh variabel PDRB Industri Pengolahan (x1) pada variabel Tenaga Kerja Industri Pengolahan (y).

B. Uji parsial antara variabel UMP (x2) terhadap variabel Tenaga Kerja Industri Pengolahan (y) diperoleh t hitung (-9,661) lebih besar dari nilai t tabel (1,970), mengandung arti bahwa setiap peningkatan UMP 1 Rp Miliar , Tenaga Kerja di Industri Pengolahan berkurang sebanyak 9,661 orang. Selain itu signifikansi (0,000) bernilai kurang dari nilai

alpha (0,050) maka dinyatakan H1 diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel UMP (x2) pada variabel Tenaga Kerja Industri Pengolahan (y).

C.Uji parsial antara variabel Unit Usaha Industri Pengolahan (x3) pada variabel Tenaga Kerja di Industri Pengolahan (y) diperoleh nilai t hitung (24,713) lebih dari nilai t tabel (1,970) mengandung arti bahwa setiap peningkatan Unit Usaha Industri Pengolahan 1 unit berdampak pada Tenaga Kerja Industri Pengolahan yang meningkat 25 orang, selain itu signifikansi (0,000) bernilai kurang dari nilai alpha (0,050) maka dinyatakan H1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Unit Usaha Industri Pengolahan (x3) pada Tenaga Kerja Industri Pengolahan (y).

#### **4.4 Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasi**

##### **4.4.1 Pengaruh PDRB Industri Pengolahan (x1) pada penyerapan tenaga kerja (Y)**

Hasil analisis ini sesuai penelitian Wicaksono dalam Muslihatinningsih (2019) yang menyatakan kenaikan permintaan output perusahaan dapat direspon dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada dan cenderung tidak meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang digunakan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Hubungan yang bertanda negatif tersebut terjadi karena semakin berkurangnya dominasi perusahaan yang berbasis padat karya, dan diganti perusahaan yang berbasis padat modal. Efisiensi produksi dari pengusaha menimbulkan peningkatan nilai produksi dalam hal ini nilai PDRB tanpa adanya peningkatan penggunaan tenaga kerja baru dan mengarahkan pada moderanisasi cara produksi dengan mesin berteknologi tinggi yang lebih praktis sekaligus menghasilkan produk dengan cepat dan berkualitas. Sekaligus sebagai bentuk karakteristik pengusaha yang lebih suka menggunakan sedikit tenaga kerja baru, mengutamakan penerimaan laba, dan tidak berperan sebagai lembaga sosial dilihat dari banyaknya industri yang menggunakan tenaga kerja outsourcing.

##### **4.4.2 Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai (x2) pada penyerapan Tenaga Kerja (Y)**

Hasil penelitian ini didukung teori penyerapan Tenaga Kerja di pasar kompetitif menyatakan semakin tingginya upah yang harus dibayarkan perusahaan maka perusahaan cenderung mengurangi ataupun tidak melakukan penambahan penggunaan Tenaga Kerja sebagai upaya meminimalkan biaya produksi sekaligus mempertahankan tingkat keuntungan dan skala produksi. Sejalan dengan penelitian Suryahadi (2002) yang menyatakan upah minimum cenderung menguntungkan sebagian pekerja namun akan merugikan sebagian pekerja, perusahaan cenderung mengurangi penggunaan Tenaga Kerja jenis tertentu khususnya Tenaga Kerja usia muda, perempuan, berpendidikan rendah, serta paruh waktu. Mengganti dengan lebih banyak Tenaga Kerja jenis kerah putih, sekaligus mengarahkan produksi menjadi padat modal dengan menyesuaikan kebutuhan teknologi bagi pekerja kerah putih. Penerapan UMP ternyata belum mampu mendukung kenaikan permintaan Tenaga Kerja Industri Pengolahan, tingkat UMP yang terus meningkat tiap tahunnya bagi pengusaha membebani dan tidak efisien, pengusaha meningkatkan substitusi penambahan tenaga kerja dengan penambahan mesin-mesin dalam proses produksi, industri pengolahan cenderung kearah padat modal. Disamping rendahnya kualitas tenaga kerja dipengaruhi tingkat pendidikan formal, dan kurang memadainya ketersediaan lembaga pelatihan.

##### **4.4.3 Pengaruh Jumlah Unit Usaha (X3) pada penyerapan Tenaga Kerja**

Penelitian yang mendukung hasil penelitian ini diantaranya oleh Nuswantara (2011) setiap jumlah unit usaha meningkat 1 unit maka nilai penyerapan tenaga kerja akan meningkat 10 orang, sekaligus menunjukkan bahwa unit usaha adalah faktor yang utama dalam menentukan penyerapan tenaga kerja Industri kecil Kabupaten Pati. Pertumbuhan jumlah Unit Usaha memunculkan permintaan baru dari perusahaan terhadap sejumlah Tenaga Kerja. Profil industri pengolahan dipulau jawa cenderung bersifat padat modal dengan besarnya investasi yang masuk pada sektor industri sehingga unit usaha baru mementingkan penggunaan faktor produksi non SDM serta mesin-mesin produksi dalam jangka panjangnya cenderung menghasilkan biaya produksi yang lebih murah. Maka untuk semakin meningkatkan pertumbuhan jumlah unit usaha industri pengolahan menurut kementerian perindustrian melalui peningkatan investasi padat karya yang harus didukung infrastruktur yang lengkap dan terintegrasi guna meminimalkan biaya transportasi serta mempermudah regulasi dan pemberian insentif fiskal maupun non fiskal bagi PMA maupun PMDN untuk membangun sektor industri padat karya.

##### **4.4.4 Pengaruh PDRB Industri Pengolahan (X1),Upah Minimum Provinsi (X2) dan Unit Usaha Industri Pengolahan (X3) secara bersama Pada Penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan (Y1)**

Naik atau turunnya nilai PDRB Industri Pengolahan, UMP dan Unit Usaha Industri Pengolahan secara bersama-sama akan mempengaruhi naik atau turunnya nilai penyerapan Tenaga Kerja di Industri Pengolahan Pulau Jawa selama tahun 2010-2019. Hubungan ketiga variabel tersebut dapat dilihat dalam fungsi produksi mengenai nilai output produksi sebagai nilai PDRB Industri Pengolahan yang besarnya bergantung pada nilai dan komposisi penggunaan faktor-faktor input yaitu penggunaan Tenaga Kerja dan faktor input lain seperti modal dan teknologi, dengan pengembaliannya berupa upah untuk Tenaga Kerja dan bentuk pengembalian lain atas faktor input lainnya, besarnya tingkat upah dan jenis pengembalian lain bergantung pada tingkat penggunaan faktor produksi, sementara jumlah Unit Usaha menentukan banyaknya Tenaga Kerja dalam proses produksi.

## **E.**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa

selama 2010-2019 adalah UMP, Unit Usaha Industri Pengolahan dan PDRB Industri Pengolahan.

1) Variabel PDRB industri pengolahan berpengaruh signifikan dan bertanda negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya peningkatan nilai PDRB Industri Pengolahan relatif mengurangi penyerapan akan Tenaga Kerja di Industri Pengolahan. Sesuai penelitian Pangastuti (2015) menyatakan PDRB berpengaruh secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja negatif di provinsi Jawa Tengah. Hubungan yang negatif tersebut menunjukkan bahwa industri pengolahan mengarah ke industri padat modal.

2) Variabel UMP berpengaruh dengan signifikan dan bertanda negatif terhadap tingkat Tenaga Kerja di Industri Pengolahan, artinya peningkatan nilai Upah Minimum Regional (UMP) mendorong pengurangan penyerapan Tenaga Kerja di Industri Pengolahan. Sesuai penelitian Sulistiawati (2011) bahwa upah telah signifikan dan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi-Provinsi di Indonesia tahun 2006-2010. Hubungan negatif tersebut menunjukkan adanya kontradiksi dari kebijakan UMP sebagai jaring pengaman untuk kesejahteraan tenaga kerja namun masih menjadi beban bagi biaya produksi pengusaha.

3) Variabel Unit Usaha Industri Pengolahan secara signifikan bertanda positif terhadap Tenaga Kerja di Industri Pengolahan, berarti dengan kenaikan Unit Usaha Industri Pengolahan maka terjadi kenaikan pula terhadap Tenaga Kerja PDB. Sesuai penelitian Nuswantoro (2011) jumlah unit usaha sebagai variabel paling signifikan berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pati. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa penambahan unit industri baru secara langsung menambah permintaan akan tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pekerjaan anak di Jawa Timur, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

### Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam lingkup kota/kabupaten maupun Provinsi di Pulau Jawa diharapkan dalam jangka panjang mampu mengarahkan Industri Pengolahan di Pulau Jawa ke arah Industri Padat Karya yang mengoptimalkan penggunaan Tenaga Kerja. Serta mengembangkan program dan iklim yang kondusif bagi terciptanya investasi padat modal.
2. Pengusaha yang berkecimpung dalam Unit Usaha Industri Pengolahan di Pulau Jawa diharapkan dapat menyesuaikan teknologi dan cara berproduksinya agar lebih human oriented, dalam artian mempertimbangan penggunaan tenaga kerja pada penggunaan teknologi produksi yang baru sehingga dapat meningkatkan kebutuhan akan Tenaga Kerja Pulau Jawa.
3. Dinas ketenagakerjaan perlu lebih mendukung peningkatan kualitas SDM yaitu para pekerja melalui pengintensifan program pelatihan soft skill dan kompetensi pendukung lain yang meningkatkan daya saing Tenaga Kerja dalam pasar tenaga kerja.
4. Hasil penelitian ini masih sederhana untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang kompleks. Maka bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel bebas lain serta menggunakan data yang lebih lengkap.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Roni, 2010, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia, Skripsi: FEM, Institut Pertanian Bogor.
- Ananta, Aris. 1990. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan PAU Bidang Ekonomi Universitas Indonesia
- Antiyatna, dirta pratama, Muhyiddin, nurlina T., & Soebyakto, bambang bemby. 2016. Pengaruh upah minimum , pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 8–21.
- Badan Pusat Statistik Definisi Produk Domestik Provinsi Bruto (PDRB)
- Buchari, Imam. 2016. Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. EKSIS. VI XI No 1.
- Damodar.N.Gujarati and Dawn.C.Porter. 2012. Dasar-dasar ekonometrika. Jakarta:Salemba empat.
- Ekananda, Dr Mahyus.2015. Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Social dan Bisnis.Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Gujarati, Damodar. 1997. Ekonometrika Dasar,. Erlangga Jakarta. Terjemahan Dr. Gunawan Sumodiningrat, BPFE UGM, Yogyakarta
- Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
- Kusnendi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta:PPUT.

- Lalu Husni. 2015. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan;Edisi Revisi. Jakarta:RaJawali Pers.
- Mankiw,N.Gregory .2007. Makro Ekonomi Edisi ke-6. Jakarta: Erlangga
- Mankiw, N.Gregory. 2014. Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia.Jakarta: Salemba Empat.
- Maulia, p. (2014). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di provinsi jawatimur 2001-2011. *Skripsi departemen ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan manajemen institut pertanian bogor bogor*
- Muhtamil . 2017. Pengaruh Perkembangan Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* .VI. 4,No. 3
- Muslihatinningsih, Fivien. 2019. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolaha. *JURNAL EKONOMI EKUILIBRIUM (JEK)*. VI 3 No. 2.
- Nuswantoro, Nunuk. 2011. Pengaruh Investasi, Nilai Produksi dan Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Kabupaten Pati. *Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.*
- Pangastuti, Yulia.2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa tengah. *Economics Development Analysis Journal*. VI 4 ,No 2.
- Suleiman, S., Kassim, S., & Hemed, I. (2017). Unemployment and Economic Growth in Tanzania. *Journal of Economics, Management and Trade*, VI 20, No 2.
- Sulistiawati , Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal EKSOS*. VI 8, No 3,
- Sugiyono. 2009 . Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Payaman ,Simanjuntak.1985.Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.Jakarta:BPFE UI
- Payaman , Simanjuntak. 2002. Masalah Upah dan Jaminan social. Jakarta:LPFE UI.
- Ropingi, 2004. Analisis identifikasi dan peranan sektor pertanian dalam menghadapi otonomi daerah di kabupaten boyolali. *Jurnal pembangunan pedesaan VL.IV No.3*.
- Rasyad,Rasdihsan. 2003. Metode Stastistik Deskriptif: Untuk Umum. Jakarta:Grasindo.
- Rochmani, T. S. 2016. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Gresik. *JIEP*, 16(2).
- Sekaran,uma. 2006. Metode penelitian untuk bisnis, Edisi 4.Buku 1. Jakarta:Salemba empat.
- Sudarman . 1988. Teori Ekonomi edisi 1,Yogyakarta:BPFE
- Sugiyono. 2009 . Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno. 2005 .Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suleiman, S., Kassim, S., & Hemed, I. 2017. Unemployment and Economic Growth in Tanzania. *Journal of Economics, Management and Trade*, 20(2), 1–8.
- Sumarsono, Sonny. 2009. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketenagakerjaan
- Widoyoko,eka putra. 2012. Teknik penyusunan instrument penelitian. Yogyakarta:Pustaka belajar.



